PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
DPMPTSPTK

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN



2025

Prepared by :
DPMPTSPTK

https://dpmptsptk.tobakab.go.id
(0632) 21999
bpptpmtobasa@gmail.com
Jalan Mulia Raja No.24 Balige

SALINAN

BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TOBA
NOMOR 441 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA
TAHUN 2025

BUPATI TOBA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan bahwa penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);

Dipindai dengan CamScanner

15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Toba Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Diktum ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten;
2. Inspektorat;
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
8. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
9. Dinas Lingkungan Hidup;
10. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Kesehatan;
13. Dinas Pertanian;
14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
17. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
20. Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
27. Kecamatan Ajibata;
28. Kecamatan Bonatua Lunasi;

Dipindai dengan CamScanner

29. Kecamatan Borbor;
30. Kecamatan Habinsaran;
31. Kecamatan Laguboti;
32. Kecamatan Lumban Julu;
33. Kecamatan Parmaksian;
34. Kecamatan Porsea;
35. Kecamatan Siantar Narumonda;
36. Kecamatan Silaen;
37. Kecamatan Tampahan;
38. Kecamatan Uluan;
39. Kecamatan Nassau;
40. Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
41. Kecamatan Sigumpar

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Tahapan Verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk memastikan telah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 09 Juli 2025

BUPATI TOBA,

Cap/dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n SEKRETARIS DAERAH KAB.TOBA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
b.Kepala Bagian Hukum

LUSIANA JANTI SIAGIAN, SH, MH
NIP. PJ750804 200502 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba;
2. Inspektur Kabupaten Toba;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat disusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan merupakan dokumen Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diaplikasikan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini disamping sebagai dokumen perencanaan, juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba Tahun 2025, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Balige, Agustus 2025.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA



Drs. REGUEL HASADAAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700626 199009 1 001

DAFTAR ISI

		Hal
HALAMAN JUDUL		
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iv
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	6
	1.3 Maksud dan Tujuan	10
	1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II	**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN**	**12**
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I	12
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	25
	2.4 Review terhadap RKPD	31
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	46
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**	**48**
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	48
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	49
	3.3 Program dan Kegiatan	51
BAB IV	**RENCANA KERJA PROGRAM DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	**67**
BAB V	**PENUTUP**	**73**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahanan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir dengan Tipe B. Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud adalah Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten toba (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 4).

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba merupakan Institusi yang mempunyai tugas yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Toba Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Toba kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba, ada beberapa izin dan non izin yang didelegasikan antara lain :

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Tingkat Risiko Kegiatan Usaha	**Jenis Perizinan Berusaha**
Risiko Rendah	Nomor Induk Berusaha (NIB)
Risiko Menengah	Sertifikat Standar
Risiko Tinggi	Izin

B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)

Sektor	**Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha**
Kelautan dan Perikanan	1. Surat Izin Usaha Perikanan
Perdagangan	1. Tanda Daftar Gudang 2. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL B dan C) 3. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi Penerima Waralaba
Kesehatan, Obat dan Makanan	1. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama di RS Pemerintah (Non OSS) 2. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Madya di RS Pemerintah (Non OSS) 3. Label pengawasan / pembinaan tempat pengelolaan pangan di tempat pengelolaan pangan di Kabupaten/Kota 4. Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) 5. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi 6. Sertifikat Laik Sehat 7. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
Pertanian	1. Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner 2. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner 3. Sertifikat Cara Budi Daya Ternak Yang Baik 4. Sertifikat Cara Pembibitan Ternak Yang Baik 5. Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil
Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung
Transportasi	1. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perawatan dan perbaikan kapal 2. Sertifikat pemutakhiran tahunan: standar 2 (dua) tahunan

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air 2. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan bagian-bagian Jalan

C. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN LAINNYA

Sektor	Perizinan dan Nonperizinan
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Rekomendasi Kesesuaian TataRuang Wilayah 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 3. Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung 4. Izin Penyelenggaraan Reklame
Lingkungan Hidup	1. Persetujuan Lingkungan
Kesehatan	1. Izin Praktik Tenaga Kesehatan 2. Izin Tukang Gigi 3. Izin Operasional Puskesmas 4. Izin Penyelenggaraan Hemodialisa
Pendidikan	1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal 2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 ialah **"Toba Mantap 2029" "*Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya*"** Berdasarkan Visi Kabupaten Toba tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Misi Kabupaten Toba Tahun 2025 - 2029, adapun Misi tersebut yaitu :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak;
2. Membangun Infrastruktur yang Terintegrasi, Berkualitas dan Merata;
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan Berbasis Potensi Daerah dan Mendukung Kemandirian Daerah;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Sebagai Pelayan (Parhobas) Rakyat;
5. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban;
6. Melestarikan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal.

Berdasarkan penjabaran atas Misi Kabupaten Toba Tahun 2025 - 2029 di atas, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba terkait dengan misi ke tiga yaitu Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan Berbasis Potensi Daerah dan Mendukung Kemandirian Daerah.

Dengan menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya wilayah dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja di Kabupaten Toba guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengandung arti bahwa Pemeritah Kabupaten Toba akan memanfaatkan segala yang ada dimiliki baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk menggerakkan pembangunan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Melalui penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini dapat mewujudkan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba. Perubahan Rencana Kerja disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794) ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 4279);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4355);

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangungan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;

24. Peraturan Bupati Toba Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;

25. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba;

26. Peraturan Bupati Toba Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang diserta dengan indikator kinerja dan pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta untuk memberikan arahan, landasan yang kuat dan jelas dan sebagai alat kendali dan tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba adalah mewujudkan pemerintah daerah yang akuntabel, transparansi, efektif, efisien dan partisipatif.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Berisikan Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan.

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu.

Berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah dan Program dan Kegiatan.

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan penjelasan perubahan rencana kerja dan pendanaan program kegiatan dengan menguraikan program prioritas mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Toba, program prioritas propinsi Sumatera Utara, program prioritas nasional untuk tahun 2025.

Lampiran rencana pendanaan.

Bab V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan

- Gambaran Hasil Evaluasi Program dan Kegiatan OPD s.d Triwulan I Tahun 2025

Untuk pembangunan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan pada tahun 2025 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.755.071.199,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh lima tujuh puluh satu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah), yaitu untuk membiayai program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, program penempatan tenaga kerja, program hubungan industrial, program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, program pengembangan iklim penanaman modal, program promosi penanaman modal, program pelayanan penanaman modal, dan program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

Dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan telah melakukan efisiensi anggaran pada tahun berjalan, sehingga anggaran DPMPTSPTk saat ini menjadi Rp 6.468.368.034 (enam milyar empat ratus enam puluh delapan tiga ratus enam puluh delapan juta tiga puluh empat rupiah)

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan perubahan rencana kerja perangkat daerah dapat dilihat pada tabel T.C. 29 berikut ini :

T.C. 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA s/d TRIWULAN I TAHUN 2025

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) Kegiatan (*output*) Sub Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Satuan indikator	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
											I		II		III		IV					
1	2	3	4	5		6	7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14=7+13	
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya tenaga kerja yang mendapat pelatihan	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja**	75%	60.000.000	**dokumen**	**0,00**	**0,00**	**75%**	**50.000.000**	**0,00**	**-**							**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	***Rencana Tenaga Kerja (RTK)***	***1 dokumen***	***60.000.000***	***dokumen***	***0***	0	***1 Dokumen***	***50.000.000***	***0***	***-***							***0***	***-***	***0,00***	***-***
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	***1 dokumen***	60.000.000	dokumen	0	0	***1 Dokumen***	50.000.000	0	-							0	-	0,00	-
2	Meningkatnya tenaga kerja yang mendapat pelatihan	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi.**	**100**	**4.833.101.500**	**persen**	**47,19**	**1.116.541.939**	**4,49 persen**	**777.845.000**	**0**	**11.090.800**							**0,00**	**11.090.800**	**47,19**	**1.127.632.739**
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Pelatihan berdasarkan unit kompetensi**	**72**	**4.833.101.500**	**bulan**	**24,00**	**1.077.262.368**	**3 kegiatan**	**742.845.000**	**0**	**11.090.800**							**0**	**11.090.800**	**24,00**	**1.088.353.168**
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	300	2.441.101.500	orang	174,00	1.077.262.368	40 orang	321.845.000	0	11.090.800							0	11.090.800	174,00	1.088.353.168
		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka	240	2.150.000.000	orang	0,00	0	2 lembaga	300.000.000	0	-							0	0	0,00	-

		dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n																		
		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	6	242.000.000	orang	0,00	0	3 unit	121.000.000	0	-							0	0	0,00	-
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta**	**48**	**159.303.750**	**orang**	**415,00**	**39.279.571**	**6 lembaga**	**35.000.000**	**33**	**-**							**33**	**0**	**448,00**	**39.279.571**
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	34	130.000.000	orang	12,00	38.113.458	6 lembaga	35.000.000	33	-							33	0	45,00	38.113.458
3		**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten**		**75.075.000**	**persen**		**44.249.271**	**100 persen**	**105.000.000**	**100 %**	**0**							**100%**	**0**		
		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten /Kota**	**0**	**40.000.000**	**perusahaan**	**0**	**-**	**6 perusahaan**	**40.000.000**	**0**	**0**							**0**	**0**		
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yangDiberdayakan Melaluiprogram PerluasanKesempatan Kerja	20	40.000.000	0rang	0	0	200rang	40.000.000	**0**	**0**							**0**	**0**		
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**0**	**33.075.000**	**orang**	**36**	**44.249.271**	**12 Bulan**	**25.000.000**	**3 Bulan**	**0**							**0**	**0**		
		Pelayanan dan	Jumlah Pencari dan	12	33.075.000	orang	642	44.249.27	150 orang	25.000.000	14 oran	**0**							**0**	**0**		

		Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)					1			g										
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan**	**0**	**2000000**	**orang**	**0**	**0**	**orang**	**40.000.000**	**0**	**0**							**0**	**0**		
		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	20	2.000.000	orang	0	0	20	40.000.000	**0**	**0**							**0**	**0**		
4	**Meningkatnya penyelesaian hubungan industrial perusahaan dan tenaga kerja**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)**	**41**	**156.451.000**	**persen**	**10,00**	**284.314.554**	**41,00**	**1.818.200.000**	**0**	**352.800.000**							**0**	**352.800.000**	**2,00**	**637.114.554**
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya	**Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)**	**1**	**10.000.000**	**persen**	**0,00**	**0**	**0,28**	**10.000.000**	**0**	**-**							**0**	**0**	**0,00**	**-**

		Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	4	10.000.000	Perusahaan	0,00	0	**4 Perusahaan**	10.000.000	0	-							0	0	0,00	-
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama**	**100**	**146.451.000**	**persen**	**40,00**	**1.320.452.408**	**100,00**	**1.808.200.000**	**0**	**352.800.000**							**0**	**352.800.000**	**8,00**	**1.673.252.408**
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	3	43.901.000	perkara	8,00	138.950.197	3 Perkara	43.000.000	0	-							0	0	8,00	138.950.197
		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1	12.000.000	Asosiasi dan SP	1,00	8.182.922	perusahaan dan pekerja	12.000.000	0	-							0	0	1,00	8.182.922

		Non Afiliasi																				
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	90.550.000	lembaga	3,00	241.507.475	perusahaan dan pekerja	90.000.000	0	-							0	0	3,00	241.507.475
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		-	Orang	0,00	931.811.814	perusahaan dan pekerja	1.663.200.000	6996	352.800.000							6996	352.800.000	######	
5	**Meningkatnya Kemudahan Berusaha**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Kinerja penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**27.765.112.963**	**persen**	**32,41**	**11.468.546.261**	**100,00**	**4.372.843.000**	**25%**	**651.934.912**							**0,25**	**651.934.912**	**6,53**	**12.120.481.173**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**253.105.103**	**persen**	**30,00**	**24.528.356**	**100,00**	**25.000.000**		**-**							**0,00**	**-**	**6,00**	**24.528.356**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40	115.242.688	dokumen	10,00	24.528.356	2	12.500.000	0	-							0	-	10,00	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28	137.862.415	laporan	10,00	-	8,00	12.500.000	0	-							0	0	10,00	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan layanan administrasi keuangan daerah**	**100**	**20.419.217.029**	**persen**	**38,38**	**6.118.423.952**	**100,00**	**3.398.709.000**	**27**	**555.248.972**							**27**	**555.248.972**	**13,08**	**6.673.672.924**

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192	20.419.217.029	orang/bulan	65,00	6.118.423.952	35	3.398.709.000	27	555.248.972							27	555.248.972	92,00	6.673.672.924
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**100**	**257.625.000**	**%**	**40,00**	**37.560.000**	**100**	**30.000.000**		**-**							**0**	**0**	**8,00**	**37.560.000**
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	257.625.000	orang	6,00	37.560.000	3	30.000.000	0	-							0	0	6,00	37.560.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan layanan administrasi umum**	**100**	**3.938.898.244**	**persen**	**39,87**	**955.495.476**	**100,00**	**441.000.000**	**0,17**	**52.572.200**							**0,17**	**52.572.200**	**8,01**	**1.008.067.676**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	154.994.225	paket	10,00	23.818.776	1,00	15.000.000	0	-							0	0	10,00	23.818.776
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	51	672.195.549	paket	51,00	295.580.560	2,00	50.000.000	0	-							0	0	51,00	295.580.560
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17	219.950.720	paket	17,00	49.186.160	4,00	20.000.000	0	-							0	0	17,00	49.186.160
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17	200.000.000	paket	17,00	95.309.226	2,00	30.000.000	0	-							0	0	17,00	95.309.226
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	62.491.250	Dokumen	6,00	9.670.000	1,00	6.000.000	0	-							0	0	6,00	9.670.000
		Penyelenggar	Jumlah	5320		laporan	101		4,00	320.000.0	1								1		###	

		aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.629.266.500		4,00	907.725.323		00		52.572.200								52.572.200	###	960.297.523
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Kinerja Aparatur**	**100**	**1.575.546.467**	**persen**	**37,83**	**499.863.260**	**100,00**	**277.000.000**	**1,00**	**37.748.840**							**1,00**	**37.748.840**	**7,77**	**537.612.100**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	238.000.307	laporan	8	68.783.718	4,00	22.000.000	1	248.840							4	248.840	12,00	69.032.558
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	1.337.546.160	laporan	20	676.500.000	2,00	255.000.000	1	37.500.000							2	37.500.000	22,00	714.000.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang Terpelihara**	**100**	**1.320.721.120**	**persen**	**23,94**	**156.965.601**	**100,00**	**201.134.000**		**6.364.900**							**0,00**	**6.364.900**	**4,79**	**163.330.501**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13	917.218.640	unit	17,00	223.493.967	10,00	135.000.000	10	5.764.900							10	5.764.900	27,00	229.258.867
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	104.841.035	unit	10,00	15.940.000	3,00	20.000.000	1	600.000							1	600.000	11,00	16.540.000
		Pemeliharaan/ Rehabilita Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	242.991.445	unit	0,00	1611287	1,00	35.000.000	0	-							0	0	0,00	1.611.287

		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	55.670.000	unit	5,00	6.230.000	3,00	11.134.000	0	-							0	0	5,00	6.230.000
6	**Meningkatnya Realisasi Investasi PMDN/PMA**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Investasi**	**5**	**55.125.000**	**%**	**0,15**	**250.981.633**	**1,00**	**93.000.000**	**0**	**3.879.000**							**0**	**3.879.000**	**0,03**	**254.860.633**
		Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**0**	**5**	**-**	Dokumen	**1,00**	**113.583.233**	**1,00**	**33.000.000**	**0**	**3.879.000**							**0**	**3.879.000**	**1,00**	**117.462.233**
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	-	dokumen	1,00	113.583.233	1	33.000.000	0	3.879.000							0	3.879.000	1,00	117.462.233
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Banyaknya daerah berpotensi**	**6**	**55.125.000**	**daerah potensi**	**1,00**	**137.398.400**	**1,00**	**60.000.000**	**0**	**-**							**1**	**-**	**2,00**	**137.398.400**
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	55.125.000	dokumen	1,00	137.398.400	1	60.000.000	0	-							0	-	1,00	137.398.400
7	**Meningkatnya Realisasi Investasi PMDN/PMA**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Badan Usaha Yang Dikendalikan**	**126**	**-**	**Badan Usaha**	**81,00**	**499.356.020**	**30,00**	**340.000.000**	**25**	**-**							**25**	**0**	**106,00**	**499.356.020**
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	**Jumlah Badan Usaha Yang Dikendalikan**	**35**	**-**	**Badan Usaha**	**81,00**	**846.402.149**	**30,00**	**340.000.000**	**25**	**-**							**25**	**0**	**106,00**	**796.015.849**

		Kabupaten/Kota																			
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	0	-	Kegiatan Usaha	7,00	50.386.300	9,00	110.648.000	0	-							0	0	7,00	50.386.300
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	0	-	Pelaku Usaha	740,00	661.089.589	224,00	160.658.000	0	-							0	0	740,00	661.089.589
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dlakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	0	-	Kegiatan Usaha	33,00	134.926.260	15,00	68.694.000	0	-							0	0	33,00	134.926.260
8		**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI**	**Jumlah aplikasi yangterintegrasi**	**1**	**#REF!**	**1 Aplikasi**	**81,00**	**46.506.863**	**20,00**	**50.000.000**	**0**	**0**										

		PENANAMAN MODAL																			
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah database yang terintegrasi**	**4**	**69.510.000**	**1 database**		**46.506.863**		**50.000.000**	**0**	**0**										
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	**1**	69.510.000	dokumen		46.506.863	1	50.000.000	**0**	**0**										
9	**Meningkatnya Kemudahan Berusaha**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP**	**100**	**99.222.520**	**persen**	**43,60**	**136.070.000**	**100,00**	**123.000.000**	**100 %**	**-**							**1,00**	**-**	**8,92**	**136.070.000**
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah perizinan dan non perizinan**	**8114**	**99.222.520**	**dokumen**	**3219**	**203.275.122**	**1.360,00**	**123.000.000**	**145**	**-**							**145**	**-**	**######**	**203.275.122**
		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang	100	88.225.082	Kegiatan Usaha	804	189.370.122	300	88.000.000	0	-							0,00	-	804,00	189.370.122

			perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha																			
		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10	10.997.438	Pelaku Usaha	28	13.905.000	20,00	35.000.000	0,00	-							0,00	-	28,00	13.905.000
10	**Meningkatnya Realisasi Investasi PMDN/PMA**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)**	**289**	**283.800.000**	**Investor**	**0**	**37.500.000**	**2**	**70.000.000**	**0**	**-**										**37.500.000**
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Terjadwalnya pelaksanaan Pameran Potensi Investas**	**4**	**283.800.000**	**Jadwal Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pameran**	**1**	**37.500.000**	**1**	**70.000.000**	**0**	**-**										**37.500.000**
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4	283.800.000	Dokumen	1	37.500.000	1	70.000.000	0	-										37.500.000
		TOTAL										**1.019.704.712**		**-**		**-**		**-**				
J U M L A H					**32.969.012.983**			**13.755.810.407**		**7.799.888.000**		**651.934.912**		**-**		**-**		**0**		**1.019.704.712**		**14.775.515.119**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

1. Bidang Pembinaan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

   Untuk mengatasi pengangguran antara lain :

   a. Penyaluran dan penempatan tenaga kerja AKAN (Antar Kerja Antar Negara), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) dioptimalkan
   b. Perusahaan di Kabupaten Toba dalam perekrutan tenaga kerja harus kerja sama dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba khususnya bidang pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi yaitu menginformasikan lowongan pekerjaan dan spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan.
   c. Penyebarluasan informasi pasar kerja dalam negeri dan luar negeri akan terlaksana dengan baik.

   Dalam bidang ini juga melaksanakan kegiatan pelatihan institusional dan pelatihan non institusional. Kegiatan pelatihan institusional yaitu pelatihan menjahit, salon, tata boga, montir sepeda motor, komputer adalah salah satu upaya untuk menanggulangi naiknya angka pengangguran.

   Karena dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat Toba dengan keterampilan yang didapat akan dapat menghidupi dirinya sendiri maupun keluarganya dengan membuat suatu usaha sesuai dengan keterampilan yang dimiliki dan pelatihan ini dilaksanakan didalam Balai Latihan Kerja dengan jumlah jam pembelajaran minimal 240 jam pelajaran / kegiatan.

   Kegiatan Pelatihan Non Institusional yaitu pelatihan menjahit, salon, souvenir, barista dan tataboga adalah salah satu upaya untuk menanggulangi naiknya angka pengangguran, karena dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat Toba dengan keterampilan yang didapat akan dapat menghidupi dirinya sendiri maupun keluarganya dengan membuat suatu usaha sesuai dengan keterampilan yang dimiliki dan pelatihan ini dilaksanakan diluar Balai Latihan Kerja dengan jumlah jam pembelajaran maxsimal 240 jam pelajaran / kegiatan.

2. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

   Kondisi umum bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja pada masa kini dapat diuraikan sebagai berikut :

   a. Minimnya Persentase jumlah perusahaan di Kabupaten perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan Dinas Tenaga Kerja;
   b. Minimnya tenaga ahli bidang ketenagakerjaan untuk menyelesaikan perselisihan;
   c. Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Toba belum seluruhnya memiliki LKS Bipartit.
   d. Akses terhadap data dan informasi ketenagakerjaan belum optimal.

3. Bidang Perizinan dan Non Perizinan.

   Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dimana perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Oleh karena itu, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan diharapkan bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para pengusaha terkait sistem pengurusan perizinan berusaha ini karena masih tergolong baru.

4. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

   Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba menyediakan layanan pengaduan secara langsung yang dilayani oleh seksi pengaduan dan pengendalian yang berada pada bidang data dan pengendalian. Pemohon juga bisa menulis kritik dan saran dan memasukkan ke kotak saran yang tersedia. Beberapa pemohon melakukan konsultasi untuk penyiapan berkas, hal-hal yang perlu dilengkapi, bagaimana dan dari mana berkas yang harus dipersiapkan. Permasalahan yang bisa diselesaikan akan langsung dibantu saat itu juga, dan tidak harus mengisi formulir pengaduan.

Namun untuk masalah teknis yang perlu waktu penyelesaian maka diharuskan mengisi formulir untuk tindakan selanjutnya.

5. Bidang Penanaman Modal.

   Berhubung dengan ditetapkannya Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba tahun depan diharapkan bisa membuat sebuah peta potensi, Peraturan Daerah tentang rencana umum penanaman modal, Peraturan Daerah tentang Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal dan juga giat dalam melakukan promosi potensi wisata kepada calon investor dan bisa membuat proposal ready to offer kepada para pengusaha untuk meningkatkan realisasi investasi.

   Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba sesuai format tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

KABUPATEN TOBA

No.	Uraian	Satuan Indikator	Target Capaian Indikator Tahun 2025	Realisasi Capaian Indikator Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1		3	4	5	6 = (5/4)*100%	7
1.	**IKU (Indikator Kinerja Utama)**					
	Jumlah Investor Berskala Nasional	investor	1375	239	0,64	DPMPTSPTK
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	89,6	92,34	1,03	DPMPTSPTK
	Nilai Realisasi Investasi	Nilai (Rp)	997.724.193.459	275.622.314.975	0,14	DPMPTSPTK
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,95%	0,00	0,00	DPMPTSPTK
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	100%	0	0,00	DPMPTSPTK
	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	100%	0,00%	0,00	DPMPTSPTK
2.	**IKS (Indikator Kinerja Sasaran)**					DPMPTSPTK
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	89,6	92,34	1,03	DPMPTSPTK
	Nilai Realisasi Investasi	Nilai (Rp)	997.724.193.459	275.622.314.975	0,14	DPMPTSPTK

	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	100%	0,00	0,00	DPMPTSPTK
	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	100%	0,0%	0,00	DPMPTSPTK
3.	**IKP (Indikator Kinerja Program)**					
	Persentase tenaga kerja yang mengacu ke Rencana Tenaga kerja	Persen	75%	0%	0,00	DPMPTSPTK
	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi.	Persen	4,49%	0%	0,00	DPMPTSPTK
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.	Persen	100%	100%	1,00	DPMPTSPTK
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	Persen	41%	0%	0,00	DPMPTSPTK
	persentase peningkatan investasi	Persen	1%	0%	0,00	DPMPTSPTK
	persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP	Persen	100%	1,00	1,00	DPMPTSPTK
	Jumlah Badan Usaha yg dikendalikan	Badan Usaha	30	25	0,83	DPMPTSPTK

	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	1	25%	0,25	DPMPTSPTK

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

I. Tingkat kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan faktor eksternal.

Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Toba.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang meliputi lingkungan internal dan eksternal.

Kondisi lingkungan tersebut akan memberikan kekuatan dan kelemahan bagi organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jalannya organisasi dalam bentuk peluang dan ancaman.

Apabila kondisi lingkungan tersebut tidak bisa dikenali dan diidentifikasi secara baik oleh organisasi, maka akan berakibat fatal terhadap kelangsungan organisasi tersebut.

Oleh karena pengaruh dan akibat yang ditimbulkan begitu besar, maka menjadi penting bagi pimpinan organisasi dan segenap jajarannnya untuk secara intensif memantau dan mengikuti perubahan di lingkungan yang terjadi.

Hal ini perlu diupayakan agar organisasi mampu menjawab setiap perubahan yang menjadi ancaman / tantangan organisasi. Dengan demikian, organisasi dalam hal ini Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan akan tetap eksis dan mampu mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian secara optimal di Kabupaten Toba.

Analisis lingkungan yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan metode " Analisis SWOT " (Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats). Analisis SWOT ini secara efektif sangat membantu dengan melakukan analisa lingkungan internal dan eksternal. Adapun empat unsur strenghts, weakness, oppurtunities, threats yang terangkum dalam lingkungan internal dan eksternal Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Faktor-faktor lingkungan internal adalah segala sesuatu yang ada di dalam organisasi yang secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan organisasi.

Faktor lingkungan internal terdiri dari aspek operasional yang meliputi sistem dan prosedur kerja, fungsi manajemen, sarana dan prasarana, sistem informasi manajemen, keuangan serta teknologi yang diperlukan dan dimiliki oleh dinas. Faktor internal akan memberikan kekuatan (sthrenghts) dan kelemahan (weakness) pada organisasi. Adapun hasil identifikasi faktor internal di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan (Sthrenghts)
    1. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik
    2. Tersedianya tenaga atau personel yang memadai
    3. Tersedianya Peraturan Perundang - undangan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
b. Kelemahan (Weakness)
    1. Masih belum optimalnya dukungan dana dengan sarana dan prasarana yang memadai.
    2. Masih kurang profesionalnya personel organisasi.
    3. Masih kurangnya tenaga teknis dan fungsional (proses regenerasi belum berjalan dengan baik.

2. Lingkungan Eksternal

Merupakan faktor – faktor di luar Organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan organisasi yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, keamanan dan teknologi.

Faktor eksternal inilah yang akan memberikan “peluang“ (opportunities) dan ”tantangan” (Threats). Adapun faktor eksternal Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Peluang (Opportunities)
   1. Adanya dukungan politis dari Pemkab Toba dan DPRD.
   2. Adanya dukungan lintas sektoral, LSM serta peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program.
   3. Dukungan lintas sektoral serta peranan aktif dunia usaha.
   4. Danau Toba yang menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
   5. Adanya gerakan reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan publik.
   6. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan kebutuhan pelayanan.
   7. Terbukanya peluang kerjasama antar daerah.
   8. Makin kondusifnya dunia usaha.

b. Tantangan (Threats)
   1. Tingginya angka pengangguran.
   2. Kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas.
   3. Masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenagakerja.
   4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap mekanisme dan prosedur yang benar terhadap pelayanan perijinan.
   5. Makin kritisnya masyarakat dan tingginya tuntunan terhadap pelayanan.

6. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan para pengusaha mikro kecil menengah.
7. Makin berkembangnya dunia usaha.
8. Promosi Penanaman Modal belum optimal dalam menarik investasi ke Kabupaten Toba ;
9. Tim teknis dari setiap Organisasi Perangkat Daerah masih berkantor di instansinya masing-masing, sehingga pelaksanaan peninjauan lapangan dan pemberian rekomendasi teknis belum maksimal dan Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang sehingga perlu penambahan staf.
10. Belum ada kajian pemetaan potensi investasi daerah Kabupaten Toba;

II. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

1. Perusahaan yang ada di Kabupaten Toba tidak menginformasikan lowongan pekerjaan pada perusahaannya ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba.
2. Perekrutan Tenaga Kerja Indonesia tidak mengikuti sistem yang benar, masih banyak sekolah-sekolah merekrut Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri tanpa sepengetahuan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba.
3. Rendahnya kesadaran perusahaan dan karyawan akan pentingnya PP dan PKB sehingga ketika muncul permasalahan Perselisihan Industrial kedua pihak akan mengalami kesulitan memahami hak dan kewajiban masing-masing.

4. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Balai Latihan Kerja dan manfaatnya bagi masyarakat.
5. Masih adanya investor yang terlambat atau bahkan tidak membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal sehingga diperlukan adanya sosialisasi penting LKPM bagi investor, perlu juga dibuat aturan yang mengatur tentang pelaporan LKPM, perlu ada sistem reward dan punishment untuk para pengusaha yang membuat LKPM.
6. Belum semua layanan dilakukan secara elektronik sehingga rekapitulasi data tidak bisa dilakukan secara cepat dan akurat. Tindak lanjutnya adalah dengan memasukkan semua layanan baik ke aplikasi umum maupun aplikasi milik daerah.
7. Sarana dan prasaran belum cukup memadai di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba, perlu dilakukan inventarisasi atau pendataan ulang serta pengadaan sarana dan prasarana.
8. Perlunya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba mengembangkan sistem pelayanan berbasis elektronik. Diperlukan banyak inovasi yang sejalan dengan perkembangan ekonomi digital saat ini.

III. Dampak Terhadap pencapaian visi terhadap visi dan misi terhadap capaian program (NSPK,SPM,SDGs)

- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan saat ini tidak mempunyai Standar Pelayanan Minimal, mengacu pada SPM kemendagri yang digunakan oleh seluruh kabupaten/kota.
- Rumusan strategis merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran yang akan dicapai, penetapatan strategi

dilakukan menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembagunan. Sustainable Development Goals (SDGs) bertumpu pada pembangunan manusia dalam ruamg lingkup sosial dan pembangunan ekonomi dimana bertujuan untuk tujuan berkelanjutan, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan dalam hal ini berfungsi sebagai pelayan administrasi di bidang perizinan dan juga pengembangan pembinaan tenaga kerja dengan Misi "Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul" dan "Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban".

IV. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan.

- Tantangan

  Dalam meningkatkan pelayanan kependudukan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan masih menghadapi tantangan antara lain Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi di bidang perizinan dan kurangnya informasi kepada masyarakat akan lowongan kerja yang ada di Kab. Toba.

- Peluang

  Adanya pelayanan perijinan melalui PTSP dan sistem online yang mempermudah masyarakat dan para investor mengurus legalitas usahanya. Dengan perkembangan teknologi, kini Dinas PMPTSPTK dapat memposting setiap lowongan pekerjaan di media social.

V. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti tahun 2025.

Tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk peningkatan capaian indikator kinerja:

- Menyediakan sosialisasi guna meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya dokumen administrasi perizinan.

- Memberikan pelayanan prima di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu kepada masyarakat di Kabupaten Toba.
- Meningkatkan upaya pemberian informasi serta penanganan konsultasi dan pengaduan terhadap izin yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba.
- Meningkatkan kapasitas tenaga kerja sehingga memiliki daya saing SDM yang tinggi di era industri 5.0
- Meningkatkan pelatihan calon pekerja, berbasis kompetensi peluang usaha/pekerjaan yang dibutuhkan.

2.4. Review terhadap P.RKPD

Review terhadap P.RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan. Berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan target kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD.

Review terhadap P.RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba Tahun 2025 semua telah dirancang memenuhi indikator sasaran yang terdapat pada RKPD. Dapat kita lihat pada Tabel. TC.31 program dan kegiatan pada awal RKPD dan analisis kebutuhan yang ingin dicapai organisasi perangkat daerah pada tahun pelaksanaan.

Tabel TC. 31

Reviu Terhadap P.RKPD Tahun 2025

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba

No.	SEBELUM					SESUDAH					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				**2.751.045.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**2.062.395.733**	
I	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja**	**75%**	**50.000.000**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja**	**0%**	**-**	
1	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTK)**	**1 dokumen**	**50.000.000**	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTK)**	**0 dokumen**	**-**	

1,1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	50.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0 dokumen	-	
II	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi**	**4,49%**	**777.845.000**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi**	**4,49%**	**343.920.575,80**	
1	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Terciptanya angkatan kerja/pencari kerja yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan yang berbasis kompetensi**	**3 kegiatan**	**742.845.000**	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Terciptanya angkatan kerja/pencari kerja yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan yang berbasis kompetensi**	**3 kegiatan**	**341.348.035,8**	
1,1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	40 orang	321.845.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	40 orang	216.348.036	
1,2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kesepakatan/Koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas	2 lembaga	300.000.000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kesepakatan/Koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas	2 lembaga	125.000.000	

			pada tahun n					pada tahun n			
1,3	Pengadaaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	3 unit	121.000.000	Pengadaaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	0 unit	-	
2	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Terciptanya LPKS yang ada di kabupaten Toba**	**6 lembaga**	**35.000.000**	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Terciptanya LPKS yang ada di kabupaten Toba**	**9 lembaga**	**2.572.540**	
2,1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina	6 lembaga	35.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina	6 lembaga	2.572.540	
III	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten**	**100 Persen**	**105.000.000**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten**	**100 Persen**	**2.825.460**	
1	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten/Kota**	**6 Perusahaan**	**40.000.000**	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten/Kota**	**6 Perusahaan**	**-**	

1.1.	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	20 orang	40.000.000	**Perluasan Kesempatan Kerja**	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	0 orang	-	
2	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Terciptanya informasi lowongan kerja dari dalam atau luar negeri bagi pencari kerja**	**12 bulan**	**25.000.000**	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Terciptanya informasi lowongan kerja dari dalam atau luar negeri bagi pencari kerja**	**12 bulan**	**2.825.460**	
2.1.	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)	150 orang	25.000.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)	150 orang	2.825.460	
3	**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitas kepulangan**	**20 orang**	**40.000.000**	**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitas kepulangan**	**20 orang**	**-**	
3,1	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan Kompetensinya	20 orang	40.000.000	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan Kompetensinya	0 orang	-	

IV	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**	**41%**	**1.818.200.000**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**	**41%**	**1.715.649.696,9**	
1	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WKP online**	**0,26%**	**10.000.000**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WKP online**	**0,26%**	**-**	
1,1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online	4 perusahaan	10.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online	4 perusahaan	-	

2	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Terselesainya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten Toba**	**100%**	**1.808.200.000**	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Terselesainya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten Toba**	**100%**	**1.715.649.697**	
2.1.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	3 perkara	43.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	3 perkara	10.196.100	
2.2.	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah asosiasi pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	12.000.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah asosiasi pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	
2.3.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	90.000.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	69.828.715	

2,4	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	7500 orang	1.663.200.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	7500 orang	1.635.624.882	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				**5.048.843.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**4.405.972.301**	
V	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Peningkatan Investasi**	**1%**	**93.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Peningkatan Investasi**	**1%**	**76.562.500**	
1	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Meningkatnya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang memperoleh insentif dan Kemudahan Berusaha di Kabupaten Toba**	**1 dokumen**	**33.000.000**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Meningkatnya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang memperoleh insentif dan Kemudahan Berusaha di Kabupaten Toba**	**1 dokumen**	**76.562.500**	
1,1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah peraturan Daerah/Provonsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	33.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah peraturan Daerah/Provonsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	76.562.500	
2	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Penerbitan 1 (satu) dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha**	**1 Daerah Potensi**	**60.000.000**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Penerbitan 1 (satu) dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha**	**1 Daerah Potensi**	**-**	

2,1	Penyusunan Peta Potensi investasi Kabupaten/Kota	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	60.000.000	Penyusunan Peta Potensi investasi Kabupaten/Kota	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi abupaten/Kota	0 dokumen	-	
VI	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)**	**2 investor**	**70.000.000**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)**	**2 investor**	**146.041.310**	
1	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Terjadwalnya Pelaksanaan Pemeran Potensi Investasi**	**1 Jadwal Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pameran**	**70.000.000**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Terjadwalnya Pelaksanaan Pemeran Potensi Investasi**	**1 Jadwal Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pameran**	**146.041.310**	
1,1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	70.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	146.041.310	
VII	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP**	**100%**	**123.000.000**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP**	**100%**	**42.546.000**	

1	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah perizinan dan non perizinan**	**1360 dokumen**	**123.000.000**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah perizinan dan non perizinan**	**1360 dokumen**	**42.546.000**	
1.1	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	20 orang	35.000.000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	20 orang	15.000.000	
1.2	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	300 Kegiatan Usaha	88.000.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	300 Kegiatan Usaha	27.546.000	

VIII	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Badan Usaha yang dikendalikan**	**30 Badan Usaha**	**340.000.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Badan Usaha yang dikendalikan**	**30 Badan Usaha**	**-**	
1	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Badan Usaha yang dikendalikan**	**30 Badan Usaha**	**340.000.000**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Badan Usaha yang dikendalikan**	**30 Badan Usaha**	**-**	
1.1	Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasiikan Kegiatan Usahanya	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam menyelesaian Kegiatan Usahanya	9 Kegiatan Usaha	110.648.000	Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasiikan Kegiatan Usahanya	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam menyelesaian Kegiatan Usahanya	9 Kegiatan Usaha	-	
1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	224 Pelaku Usaha	160.658.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	224 Pelaku Usaha	-	

1.3	Pengawasan Penanaman Modal	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan : serta Dilakukan Evaluasi Penilian Kepatutan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	15 Kegiatan Usaha	68.694.000	Pengawasan Penanaman Modal	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan : serta Dilakukan Evaluasi Penilian Kepatutan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	15 Kegiatan Usaha	-	
IX	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Aplikasi Yang Terintegrasi**	**1 Aplikasi**	**50.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Aplikasi Yang Terintegrasi**	**1 Aplikasi**	**-**	
1	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan**	**1 database**	**50.000.000**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan**	**1 database**	**-**	

1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	50.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	0 dokumen	-	
X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**4.372.843.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**4.140.822.491**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**25.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**7.128.971**	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	2 Dokumen	12.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	2 Dokumen	7.128.971	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	8 laporan	12.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	0 laporan	-	

			kinerja SKPD					kinerja SKPD			
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Cakupan Laporan Administrasi Keuangan Daerah**	**100%**	**3.398.709.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Cakupan Laporan Administrasi Keuangan Daerah**	**100%**	**3.404.819.200**	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35 orang/bulan	3.398.709.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35 orang/bulan	3.404.819.200	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**100%**	**30.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**100%**	**-**	
3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 orang	30.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	-	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des**	**Cakupan Layanan Administrasi Umum**	**100%**	**441.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des**	**Cakupan Layanan Administrasi Umum**	**100%**	**280.455.580**	

		a					**a**				
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	5.000.000	
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	71.409.186	
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 Paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 Paket	10.000.000	
4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	30.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	20.982.394	
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	2.000.000	
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	320.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	171.064.000	

5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jasa Penunjang Kinerja Apararur**	**100%**	**277.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jasa Penunjang Kinerja Apararur**	**100%**	**284.200.000**	
5,1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	22.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	22.000.000	
5,2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 laporan	255.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 laporan	262.200.000	
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Barang Milik Daerah Yang Terpelihara**	**100%**	**201.134.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Barang Milik Daerah Yang Terpelihara**	**100%**	**164.218.740**	
6,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 unit	135.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 unit	134.190.500	

6,2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 unit	7.319.400	
6,3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	35.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	20.000.000	
6,4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sarana dan prasarana pendukund gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	11.134.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sarana dan prasarana pendukund gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	2.708.840	
TOTAL KESELURUHAN					**7.799.888.000**	**TOTAL KESELURUHAN**				**6.468.368.034**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sesuai dengan kebijakan umum yakni meningkatnya kesempatan kerja dengan menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui peran serta masyarakat dan swasta.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba dapat menampung usulan dari Kecamatan jika ada diusulkan pada saat pelaksanaan forum Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan. Namun untuk tahun 2025 usulan perubahan program dan kegiatan dari Kecamatan untuk Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba tidak ada.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah erat kaitannya terhadap visi misi dari Kepala Daerah Terpilih yang telah ditetapkan melalui RPJMD 2021-2026. Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program jangka menengah selama beberapa tahun ke depan. Penetapan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factor) dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga dapat dikatakan tujuan dan sasaran dirumuskan untuk secara langsung maupun tidak langsung mendukung atau mewujudkan visi dan misi kepala daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Visi Kepala Daerah Terpilih Tahun 2025-2029 adalah

"**Toba Mantap 2029. Maju Daerah, Sejahtera Rakyatnya, berkelanjutan Pembangunannya**".

Dalam mewujudkan Visi tersebut terdapat 6 (enam) Misi yang akan dicapai, dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba mendukung Misi Kepala Daerah Terpilih yang ketiga yaitu "**Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi daerah dan mendukung kemandirian daerah** ".

Untuk mendukung Misi ketiga tersebut Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba menetapkan tujuan dan Sasaran OPD sebagai berikut :

Tujuan :

- Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja yang didukung iklim investasi yang kompetitif

Sasaran :

1. Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja
2. Mewujudkan Iklim Investasi yang Kompetitif

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	2025
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
1.	2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan			
2.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	73,52	74,48
3.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	28,25	29,25
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	92,34	92,34

3.2. Program dan Kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja memuat program, kegiatan dan indikator kinerja. Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Rumusan terhadap program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan kabupaten Toba berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yaitu: “TOBA MANTAP 2029”. Dari Visi diharapkan DPMPTSPTK mampu meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi daerah dan mendukung kemandirian daerah. DPMPTSPTK diharapkan memberikan kemudahan, kemurahan, kenyamanan dan ketepatan waktu yang diberikan kepada para masyarakat yang datang mengurus

izin maka diharapkan iklim investasi dapat bertambah untuk peningkatan kehidupan perekonomian dan untuk mendorong usaha yang legal sah memiliki izin.

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan dalam mengentaskan kemiskinan antara lain :

1. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pelatihan kepada masyarakat sebagai persiapan untuk bersaing didunia kompetensi dalam menghadapi era globalisasi.
2. Menginformasikan lowongan pekerjaan dan spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
3. Meningkatnya perlindungan hak bagi pekerja/buruh dan pengusaha melalui pengaturan syarat kerja.
4. Meningkatkan program, manfaat dan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
5. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan non perizinan
6. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

b. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan.

Dengan keterbatasan dana yang dimiliki Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba berupaya maksimal untuk meningkatkan kinerja guna mendukung keberhasilan pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Toba, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba menetapkan Program yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2025 sebanyak 7 (tujuh) program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan ini di laksanakan di Kabupaten Toba dan kelompok sasaran masyarakat yang ada di Kabupaten Toba. Total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 6.468.368.034 (enam milyar empat ratus enam puluh delapan tiga ratus enam puluh delapan juta tiga puluh empat rupiah)

Tabel rencana program dan kegiatan sebagaimana format berikut:

RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA

Rumusan P.Renja 2025					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	
(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				**2.062.395.733**	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja**	**0%**	**-**	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTK)**	**0 dokumen**	**-**	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0 dokumen	-	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS	**Kab.Toba, Semua Kecamatan,**	**Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi**	**4,49%**	**343.920.575,80**	

TENAGA KERJA	**Semua Kel/Desa**				
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Terciptanya angkatan kerja/pencari kerja yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan yang berbasis kompetensi**	**3 kegiatan**	**341.348.035,8**	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	40 orang	216.348.036	
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kesepakatan/Koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	2 lembaga	125.000.000	
Pengadaaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	0 unit	-	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Terciptanya LPKS yang ada di kabupaten Toba**	**9 lembaga**	**2.572.540**	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina	6 lembaga	2.572.540	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA	**Kab.Toba, Semua**	**Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui**	**100 Persen**	**2.825.460**	

KERJA	**Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten**			
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten/Kota**	**6 Perusahaan**	**-**	
Perluasan Kesempatan Kerja	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	0 orang	-	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Terciptanya informasi lowongan kerja dari dalam atau luar negeri bagi pencari kerja**	**12 bulan**	**2.825.460**	
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)	150 orang	2.825.460	
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitas kepulangan**	**20 orang**	**-**	
Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan Kompetensinya	0 orang	-	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Kab.Toba, Semua Kecamatan,**	**Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak**	**41%**	**1.715.649.696,9**	

	Semua Kel/Desa	**(PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**			
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WKP online**	**0,26%**	**-**	
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online	4 perusahaan	-	
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Terselesainya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten Toba**	**100%**	**1.715.649.697**	
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	3 perkara	10.196.100	
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada	Kab.Toba, Semua Kecamatan,	Jumlah asosiasi pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	

Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Semua Kel/Desa				
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	69.828.715	
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	7500 orang	1.635.624.882	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				**4.405.972.301**	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Peningkatan Investasi**	**1%**	**76.562.500**	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Meningkatnya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang memperoleh insentif dan Kemudahan Berusaha di Kabupaten Toba**	**1 dokumen**	**76.562.500**	
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah peraturan Daerah/Provonsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	76.562.500	
Pembuatan Peta Potensi Investasi	**Kab.Toba, Semua**	**Penerbitan 1 (satu) dokumen Peta Potensi**	**1 Daerah Potensi**	**-**	

Kabupaten/Kota	**Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**dan Peluang Usaha**			
Penyusunan Peta Potensi investasi Kabupaten/Kota	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi abupaten/Kota	0 dokumen	-	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)**	**2 investor**	**146.041.310**	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Terjadwalnya Pelaksanaan Pemeran Potensi Investasi**	**1 Jadwal Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pameran**	**146.041.310**	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	146.041.310	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP**	**100%**	**42.546.000**	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah perizinan dan non perizinan**	**1360 dokumen**	**42.546.000**	
Penyediaan dan pengelolaan Layanan	Kab.Toba, Semua	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan	20 orang	15.000.000	

konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	300 Kegiatan Usaha	27.546.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Badan Usaha yang dikendalikan**	**30 Badan Usaha**	**-**	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Badan Usaha yang dikendalikan**	**30 Badan Usaha**	**-**	
Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasiikan Kegiatan Usahanya	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam menyelesaian Kegiatan Usahanya	9 Kegiatan Usaha	-	
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab.Toba, Semua	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan	224 Pelaku Usaha	-	

	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
Pengawasan Penanaman Modal	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan : serta Dilakukan Evaluasi Penilian Kepatutan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	15 Kegiatan Usaha	-	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Aplikasi Yang Terintegrasi**	**1 Aplikasi**	**-**	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan**	**1 database**	**-**	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	0 dokumen	-	
PROGRAM PENUNJANG	**Kab.Toba,**	**Cakupan kinerja**	**100%**	**4.140.822.491**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**penunjang urusan pemerintah daerah**			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**7.128.971**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	2 Dokumen	7.128.971	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0 laporan	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Cakupan Laporan Administrasi Keuangan Daerah**	**100%**	**3.404.819.200**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35 orang/bulan	3.404.819.200	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**100%**	**-**	
Bimbingan Teknis	Kab.Toba,	Jumlah orang yang	0 orang	-	

Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Cakupan Layanan Administrasi Umum**	**100%**	**280.455.580**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	5.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	71.409.186	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 Paket	10.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	20.982.394	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	2.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Toba, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	4 laporan	171.064.000	

	Semua Kel/Desa	SKPD			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jasa Penunjang Kinerja Apararur**	**100%**	**284.200.000**	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	22.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 laporan	262.200.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Barang Milik Daerah Yang Terpelihara**	**100%**	**164.218.740**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 unit	134.190.500	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 unit	7.319.400	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	20.000.000	

	Kel/Desa				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sarana dan prasarana pendukund gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	2.708.840	
TOTAL KESELURUHAN				**6.468.368.034**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja memuat program, kegiatan dan indikator kinerja. Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan.

Untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Toba, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba menetapkan 7 (Tujuh) program yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2025 sebanyak 13 (tiga belas) dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 6.468.368.034 (enam milyar empat ratus enam puluh delapan tiga ratus enam puluh delapan juta tiga puluh empat rupiah)

I. Pogram Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.
   1.1. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan klaster Kompentesi.
   1.2. Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.
2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
   2.1. Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

II. Program Penempatan Tenaga Kerja.

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
   1.1. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.

III. Program Hubungan Industrial

1. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
   1.1. Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
   1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.

1.3. Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

IV. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
   1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
   3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
   3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
   3.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
   3.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
   3.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah.

4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

5.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

5.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

5.4.Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

V. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

VI Program Promosi Penanaman Modal

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi

Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

VII. Program Pelayanan Penanaman Modal.

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

1.1. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

1.2. Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evalukasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KAB. TOBA
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	18	19	20
						Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan				7.799.888.000,00	6.755.071.199,00	6.468.368.034,00			7.444.523.742,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.799.888.000,00	6.755.071.199,00	6.468.368.034,00			7.444.523.742,00	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				2.751.045.000,00	2.035.411.859,00	2.062.395.732,70			1.352.400.050,00	
1	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	75 Persen	75 Persen	50.000.000,00	0,00	0,00			0,00	
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro										
							Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
2	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi.	4,49 Persen	4,49 Persen	777.845.000,00	268.677.894,00	343.920.575,80			1.111.220.300,00	

	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	3 kegiatan	3 kegiatan	742.845.000,00	263.685.694,00	263.685.694,00			1.071.220.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi										
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	40 Orang	40 Orang	321.845.000,00	263.685.694,00	216.348.035,80	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		500.220.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja										
							Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	2 Lembaga	2 Lembaga	300.000.000,00	0,00	125.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota										

							Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	3 Unit	0 Unit	121.000.000,00	0,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		121.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta	6 Lembaga	6 Lembaga	35.000.000,00	4.992.200,00	4.992.200,00			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta										
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	6 Lembaga	6 Lembaga	35.000.000,00	4.992.200,00	2.572.540,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
3	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.	100 Persen	100 Persen	105.000.000,00	5.007.800,00	2.825.460,00			74.728.750,00	

	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten /Kota	6 Perusahaan	0 Perusahaan	40.000.000,00	0,00	0,00			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja										
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	0 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000,00	5.007.800,00	5.007.800,00			34.728.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online										

							Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	150 Orang	150 Orang	25.000.000,00	5.007.800,00	2.825.460,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil		34.728.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	20 orang	0 orang	40.000.000,00	0,00	0,00			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)										
							Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	20 Orang	0 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

4	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	41 Persen	41 Persen	1.818.200.000,00	1.761.726.165,00	1.715.649.696,90			166.451.000,00	
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	0.26 %	0.26 %	10.000.000,00	0,00	0,00			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan										
							Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	4 Perusahaan	4 Perusahaan	10.000.000,00	0,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	100 %	100 %	1.808.200.000,00	1.761.726.165,00	1.761.726.165,00			156.451.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	3 Perkara	3 Perkara	43.000.000,00	22.000.000,00	10.196.100,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		43.901.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi										
							Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota										

							Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	90.000.000,00	83.252.155,00	69.828.715,00	Pendapatan Bagi Hasil		90.550.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja										
							Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	7500 Orang	7500 Orang	1.663.200.000,00	1.656.474.010,00	1.635.624.881,90	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil DBH Sawit		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				5.048.843.000,00	4.719.659.340,00	4.405.972.301,30			6.092.123.692,00	
5	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	4.372.843.000,00	4.294.639.340,00	4.140.822.491,30			5.601.127.375,00	

	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	25.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			54.663.053,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	12.500.000,00	10.000.000,00	7.128.970,90	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24.888.938,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	0 Laporan	12.500.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		29.774.115,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Daerah	100 %	100 %	3.398.709.000,00	3.404.819.200,00	3.404.819.200,00			4.101.360.410,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.398.709.000,00	3.404.819.200,00	3.404.819.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		4.101.360.410,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

	2	1 8	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 %	0 %	30.000.000,00	0,00	0,00			55.125.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	1 8	0 1	2.0 5	001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	0 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55.125.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	1 8	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100 %	100 %	441.000.000,00	431.401.400,00	431.401.400,00			796.985.794,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	1 8	0 1	2.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil		30.998.845,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	99.591.194,00	71.409.186,00	Pendapatan Bagi Hasil		141.645.255,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil		43.990.144,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	29.995.206,00	20.982.394,40	Pendapatan Bagi Hasil		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil		12.498.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	320.000.000,00	284.815.000,00	171.064.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		527.853.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

	2	1 8	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100 %	100 %	277.000.000,0 0	284.200.000,0 0	284.200.000,0 0			328.868.894,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJ AAN
	2	1 8	0 1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		51.709.934,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJ AAN
	2	1 8	0 1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	255.000.000,0 0	262.200.000,0 0	262.200.000,0 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		277.158.960,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJ AAN

	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 %	100 %	201.134.000,00	164.218.740,00	164.218.740,00			264.124.224,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	135.000.000,00	134.190.500,00	134.190.500,00	Pendapatan Bagi Hasil		183.443.728,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	20.000.000,00	7.319.400,00	7.319.400,00	Pendapatan Bagi Hasil		20.948.207,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil		48.598.289,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	18	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	11.134.000,00	2.708.840,00	2.708.840,00	Pendapatan Bagi Hasil		11.134.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
6	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi	1 Persen	1 Persen	93.000.000,00	95.020.000,00	76.562.500,00			89.853.750,00	
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	33.000.000,00	95.020.000,00	95.020.000,00			34.728.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

	2	1 8	0 2	2.0 1	000 1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal									
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	33.000.000,00	95.020.000,00	76.562.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		34.728.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	1 8	0 2	2.0 2		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Banyaknya daerah berpotensi	1 Daerah Potensi	0 Daerah Potensi	60.000.000,00	0,00	0,00			55.125.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	1 8	0 2	2.0 2	000 4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55.125.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
7	2	1 8	0 3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	2 Investor	2 Investor	70.000.000,00	245.000.000,00	146.041.310,00			70.950.000,00	

	2	1 8	0 3	2.0 1		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terjadwalnya pelaksanaan Pameran Potensi Investasi	1 Jadwal Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pameran	1 Jadwal Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pameran	70.000.000,00	245.000.000,00	245.000.000,00			70.950.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	1 8	0 3	2.0 1	000 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	245.000.000,00	146.041.310,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		70.950.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
8	2	1 8	0 4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP	100 persen	100 persen	123.000.000,00	70.000.000,00	42.546.000,00			104.183.646,00	
	2	1 8	0 4	2.0 1		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perizinan dan non perizinan	1360 Dokumen	1360 Dokumen	123.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00			104.183.646,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

	2	1 8	0 4	2.0 1	000 7	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko										
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	35.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11.547.310,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	1 8	0 4	2.0 1	000 8	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko										
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	300 Kegiatan Usaha	300 Kegiatan Usaha	88.000.000,00	40.000.000,00	27.546.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		92.636.336,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
9	2	1 8	0 5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Badan Usaha yg dikendalikan	30 Badan Usaha	30 Badan Usaha	340.000.000,00	0,00	0,00			153.023.421,00	

	2	1 8	0 5	2.0 1		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha yg dikendalikan	30 Badan Usaha	30 Badan Usaha	340.000.000,0 0	0,00	0,00			153.023.421,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJ AAN
	2	1 8	0 5	2.0 1	000 4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya										
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	9 Kegiatan Usaha.	9 Kegiatan Usaha.	110.648.000,0 0	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		49.799.650,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJ AAN
	2	1 8	0 5	2.0 1	000 5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha										
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	224 Pelaku Usaha	224 Pelaku Usaha	160.658.000,0 0	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		72.307.190,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJ AAN
	2	1 8	0 5	2.0 1	000 6	Pengawasan Penanaman Modal										

							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	15 Kegiatan Usaha	15 Kegiatan Usaha	68.694.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		30.916.581,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
10	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	1 Aplikasi	0 Aplikasi	50.000.000,00	15.000.000,00	0,00			72.985.500,00	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah database yang terintegrasi	1 database	0 database	50.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			72.985.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik										

							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		72.985.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	J U M L A H									**7.799.888.000,00**	**6.755.071.199,00**	**6.468.368.034,00**			**7.444.523.742,00**	

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam P.RKPD Kabupaten Toba Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Balige, 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA

Drs. REGUEL HASADAAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700626 199009 1 001